



Pemda DIY Raih Predikat SAKIP AA 7 Kali Berturut-turut



Gubernur DIY Sultan HB X menerima penghargaan yang diserahkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

JAKARTA (KR) - Pemda DIY kembali meraih predikat tertinggi dengan nilai AA atau Sangat Memuaskan, dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10). Sultan HB X berterima kasih atas penghargaan SAKIP yang telah diberikan untuk ketujuh kalinya tersebut. Sultan berharap prestasi serupa bisa diraih

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya se-Indonesia sehingga pelayanan publik terus meningkat. "Harapannya provinsi-provinsi lain juga bisa mencapai hal sama. Karena perlu lompatan yang bagus untuk belajar membangun birokrasi yang bagus. Apa yang kami capai pada hakikatnya dalam rangka membangun akun-

tabilitas Pemerintah Daerah. Selain itu, jika kita ingin maju bersama maka perlu menjaga konsistensi," kata Sultan. Sultan memberikan apresiasi kepada personel yang telah menjaga konsistensi pelayanan publik maupun sistem manajemen pemerintahan daerah. Konsistensi tersebut didapatkan berkat upaya Pemerintah membangun

kesadaran aparatur sipil negara (ASN). Jadi bukan sekedar pekerja kantor tetapi pekerja peradaban. "Capaian ini tidak hanya sekadar 5-7 tahun, tetapi lebih dari 10 tahun ditambah suatu lompatan yang akhirnya menjadi punggukit. Kami belajar (berproses) supaya terbentuk pola pikir untuk membangun komunikasi dialog antara pimpinan dan bawahan sebagai suatu hal yang utama dalam pencapaian tujuan institusi," jelasnya. Menurut Raja Kraton Yogyakarta tersebut, capaian predikat tertinggi SAKIP telah melalui proses panjang dan tidak instan, yang terbagi dalam empat kategori penilaian internal. Jadi ketika masih ada

OPD yang mendapat nilai merah, lalu berubah menjadi kuning, hijau, hingga akhirnya sekarang hampir semua OPD di lingkup Pemda DIY mendapatkan penilaian internal biru (sangat baik). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menyatakan, pihaknya telah menyiapkan semua perangkat untuk menyesuaikan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena semua sudah mulai bergeser dari pegawai kantoran menjadi pegawai peradaban. Karena itu konsistensi menjadi sangat penting. Konsistensi perlu didevikan dengan baik supaya pelayanan bisa dilakukan maksimal.

"Tujuh kali mempertahankan SAKIP dengan predikat AA bukan perkara mudah dan sederhana, tapi butuh effort luar biasa dari semua komponen pelaksanaan sampai puncak tertinggi. Jadi dibutuhkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas," terang Beny. Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menambahkan, meski angka kemiskinan mengalami penurunan, tapi belum terlalu signifikan. Kondisi itu menjadikan penurunan kemiskinan masih jadi tantangan besar bagi Pemda DIY. Karena empat indikator terkait kinerja SAKIP salah satunya kemiskinan.

* Bersambung hal 7 kol 5



Perwakilan Pemda DIY bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas usai penerimaan penghargaan.

Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR Golkar Bantah Ada 'Tukar Guling'

JAKARTA (KR) - Kabar soal 'tukar guling' kursi Ketua MPR merebak di tengah-tengah rapat paripurna lembaga tinggi tersebut. Isu yang berkembang, Rabu (2/10), Ketua MPR bakal diberikan wakil rakyat dari Gerindra. Sedangkan, sebagai imbalan atas kerelaan Golkar melepas kursi Ketua MPR akan mendapat 'jatah' menteri di kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Sarmuji membantah partainya melakukan tukar guling kursi Ketua MPR RI dengan jatah kursi menteri tersebut. "Jadi, andaikan Golkar banyak dapat menteri, ya>P> itu bukan karena tukar guling, tapi Pak Prabowo mengetahui betul banyak orang di Golkar dalam kategori zaken sebagaimana yang dikehendaki Pak Prabowo," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, kemarin.

Ia menyebut, apabila partai-

nya mendapatkan banyak kursi menteri pada kabinet mendatang hal itu lantaran Partai Golkar memiliki banyak kader yang merupakan seorang teknokrat. "Sebetulnya bukan soal ganti-menganti, tapi saya meyakini Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak terisi kaum teknokrat, orang yang dalam perjalanan karier politiknya ditempa dalam teknokrasi," ujarnya.

Sarmuji berharap partai ber-

lambang pohon beringin itu akan mendapatkan kursi menteri lebih dari lima pada kabinet Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjawab isu yang menyebut dirinya akan menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 dengan mengatakan, penentuan pimpinan lembaganya masih berproses.

"Tunggu, semua sedang berproses, sehingga semuanya berjalan sesuai mekanisme yang berjalan," kata Muzani.

Pada bagian lain, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, apabila kursi Ketua MPR diperoleh partainya, diyakini akan menunjukkan keseimbangan politik yang cantik dan menggambarkan keberagaman pendapat di Indonesia.

"Apabila Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, tampak keseimbangan politik yang cantik,

menggambarkan keberagaman pendapat di republik ini. Dengan begitu rekonsiliasi nasional mendapatkan titik awal yang baik," kata Riza Patria.

Ia mengatakan, ada tiga lembaga perwakilan di tingkat nasional yaitu MPR, DPR dan DPD, Ketua DPR otomatis diambil PDI Perjuangan, sedangkan Ketua DPD dimenangkan Sultan Najamudin "Diusungunya Ahmad Muzani untuk menggambarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, pascapilpres yang banyak mengurus energi lahir dan batin, kini telah tiba masa dimana semua pihak membina kolaborasi politik tanpa meninggalkan check and balances," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara

* Bersambung hal 7 kol 1

BUNTUT PERTEMUAN DENGAN TERPIDANA KPK Dewas Didesak Usut Alex Marwata

JAKARTA (KR) - Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Terlebih Polda Metro Jaya juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Alex Marwata.

"Dugaan pelanggaran etik Alexander Marwata itu adalah karena yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang berstatus menjadi terpidana KPK," kata koordinator KAMPUD Irwan di Jakarta, Rabu (2/10).

Menurutnya, Polda Metro Jaya yang sudah menerima pengaduan masyarakat (dumas) pada 23 Maret 2024 perihal perkara Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK yang telah melakukan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Polda Metro Jaya juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas (Springas) pada 5 April 2024 dan telah diperbaharui atau diperpanjang pada 9 September 2024.

"Peristiwa ini tentu saja sangat melukai seluruh rakyat Indonesia, khususnya pihak-pihak yang sedang berjuang mendapatkan keadilan di Republik Indonesia. Di mana seorang Alexander Marwata yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum justru melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji bagi seorang Aparat Penegak Hukum," ucapnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:31	14:38	17:36	18:45	04:07

Kamis, 3 Oktober 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Analisis Kabinet Zaken

Tulus Warsito



KIRA-kira sepekan belakangan ini banyak tersiar di pelbagai media bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih akan menyusun Kabinet Zaken. Gagasan itu sepenuhnya didukung oleh parlemen, dengan sukacita dipersilakan untuk membangun kabinet dengan model dan jumlah menteri yang dianggap pantas. Kemudian banyak orang bertanya: Kabinet Zaken itu mahluk apa? Mengapa Prabowo menganggapnya perlu dibuat?

Kabinet zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menternya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Pendek kata, kabinet zaken adalah susunan kabinet yang para menteri ditunjuk bukan berdasarkan afiliasi partai politik, melainkan berdasarkan keahlian profesionalnya. Kabinet zaken adalah kabinet meritokrasi, kabinet teknokrasi.

* Bersambung hal 7 kol 1

TOLAK PEMBANGUNAN TEMPAT HIBURAN MALAM

Warga Kronggahan Geruduk Pemkab Sleman

SLEMAN (KR) - Ratusan warga Padukuhan Kronggahan Kalurahan Trihanggo Gamping geruduk Pemkab Sleman untuk menggelar aksi damai menolak pembangunan tempat hiburan malam di wilayahnya. Perwakilan warga diterima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sleman Kusno Wibowo bersama Kepala Biro Tapem Setda DIY Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhonegoro serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sleman bertempat di Aula Lantai 3 Setda Sleman, Rabu (2/10).

Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan warga Kronggahan menyampaikan aspirasinya terkait penolakan pembangunan tempat hiburan malam (Liquid) berlokasi

di wilayah Dusun Kronggahan I. Penolakan warga dilatarbelakangi berbagai hal di antaranya tidak adanya pemberitahuan se-

cara jelas kepada warga terkait pembangunan tempat hiburan malam.

Selain itu, perwakilan warga juga menyebut ada

kekhawatiran dampak negatif yang ditimbulkan dengan dibangunnya tempat hiburan malam.

* Bersambung hal 7 kol 5



Warga Kronggahan, Trihanggo, Gamping menggelar aksi di Pendapa Parasamy Setda Sleman menolak pembangunan tempat hiburan di daerahnya.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SELAMA 12 tahun saya menjadi loper sekali-pengasong koran, baru kali ini, tepatnya Jumat 13 September 2024, ada seseorang yang turun dari mobil membeli KR saya dengan uang Rp 100.000 tanpa kembalian. Beliau bercerita, ternyata pernah menjadi loper koran pada 1990-1995, dan sekarang jadi PNS di Jakarta. Hmmm.... terima kasih... berkah, berkah, Jumat berkah. (Triyanto, Topadan, Klawung 01-29, Margoagung, Seyegan, Sleman 55561).-f